

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2019. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Agus Rusianto, 2020. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset,
- Anastasia Powell & Nicola Henry, 2017, *Sexual Violence in A Digital Age*. Jerman: Springer.
- Andi Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019, *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Non Kodifikasi)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2017. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwi Haryadi, 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lima.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi Amrani, 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, 2020, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta: Deepublish.
- Harun M. Husein, 2005. *Surat Dakwaan: Teknis Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Jur Andi Hamzah, 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M.Friedman, 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidina Rahmawati, 2021. *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Terhadap Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta Sinar Grafika.
- , 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika..
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

-----, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Tim Penyusun, 2021. *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Widodo, 2021. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan bedah Kasus*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.

Zarizana Abdul Aziz and Janine Moussa. "Covid-19 and Against Women." *COVID-19 and Human Rights (2021)*, London: Roudge Taylor and Francis Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 3258 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

C. Jurnal

Alessandra Carlton, 2019. Sextortion: The Hybrid Cyber-Sex Crime. *NCJL & Tech*, Vol. 21, No. 177.

Anastasia Powell, Henry, N., Flynn, A., & Scott, A. J, 2019. Image-Based Sexual Abuse: The Extent, Nature, and Predictors of Perpetration in A Community Sample of Australian Residents. *Computers in Human Behavior*, 92, 393-402.

Annisa Hafizhah, & Lamsumihar Andjelina Panggabean, 2021, Kekeliruan Pemahaman Tentang *Online Grooming* dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2. No. (1), 1-11.

Ceren K peli, 2019, Legal Analysis of Sextortion Crime in The Comparative Law and Turkish law. *Health sciences quarterly*, 3(5), 87-98.

Clare McGlynn, Erika Rackley, and Ruth Houghton. (2017). Beyond ‘revenge porn’: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse. *Feminist Legal Studies*, Vol, 25(1), No, 25-46.

Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, 2021. Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia. *Lex Renaissance*. Vol. 6, No. (4), 781-798.

Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan, 2019. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara *Online* Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID. B/2018/PN. JKT UTR. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1. No. (2), 497-521.

Hwian Christianto, 2017. Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Veritas et Justitia*. Vol. 3. No. (2). 299-326.

Indriana Dwi Mutiara Sari, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. 2019. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol, 1, No, 2: 171-181.

- Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber, *Jurnal Paradigma Hukum Indonesia*. Vol. 9, No. 1.
- Kantjai, Marcellly M, 2016, "Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas." *Lex Crimen*, Vol, 5, No, 1
- McMahon, R., Bressler, M. S., & Bressler, L, 2016, New Global Cybercrime Calls For High-Tech Cyber-Cops, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol, 19(1), No, 26.
- Mohammad Kenny Alweni, 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8. No. 3. 2019.
- Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*). *Badamai Law Journal*. Vol. 5. No. (1). 140-149.
- Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, 2018. Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47. No. (3), 215-227.
- Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9 No. 5 (2016): 11-22.
- Puteri Hikmawati, 2021, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (*The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. (1), 59-79.
- Rachman, W. E. K., M. S Simatupang, Yessy Kurnia, & Rela Putri. 2020. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *Rechtsidee*. Vol. 15. No. (1). 133-153.
- Rahel Octora, 2019. Problematika Pengaturan *Cyberstalking* (Penguntitan di Dunia Maya) dengan Menggunakan Anonymous Account Pada Sosial Media. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol. 11. No. (1), 77-96.
- Rezky Bagas Pradipta, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, 2020. Menelaah Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/pid. B/2015/pn. Pdp). *Jurnal Recidive*, Vol. 9, No.(3), 238-243.

Roberta Ligget O'Malley & Karen M. Holt, 2022. Cyber sextortion: An exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in A Similar Crime. *Journal of interpersonal violence*, 37(1-2), 258-283.

Sylverio Chris Talinusa. 2015. Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*. Vol. 4. No. (6).

D. Skripsi

Fikri Chandra Permana, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Johny Krisnan, 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

E. Artikel/Internet/ Dokumen

Association for Progressive Communications, 2017. *Online gender-based violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*. https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf. Diakses pada 25 April 2022 Pukul 04.39 WIB.

CEDAW, (1992), "General Recommendation No. 19" (11th session, 1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html>. Diakses pada 30 Desember 2021 Pada Pukul 14.21 WIB.

Dini Pramita, *Platform Digital Kekerasan Seksual*, (29 Mei 2021). <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/163314/bagaimana-bisnis-pornografi-menggunakan-video-pemerasan-seksual-tumbuh-di-indonesia>. Diakses pada 1 Januari 2021 Pukul 21.51 WIB.

Dwi Hadya Jayani, 2021. *Penetrasi Internet Indonesia Meningkatkan saat Pandemi Covid-19 Perkembangan Rumah Tangga yang Menggunakan Internet (2016-2020)*. (6 Oktober 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>. Diakses pada 11 Maret, Pukul 09.39 WIB.

Federal Bureau of Investigation (FBI), 2018, *What Is Sextortion?* (8 Juli 2018), <https://www.fbi.gov/video-repository/newss-what-is-sexortion/view>. Diakses pada 30 Desember 2021, Pukul 11.39 WIB.

Federal Bureau of Investigation (FBI), 2020. *Cyber Extortion Scams Increasing During the COVID-19 Crisis*. (20 Juni 2020). <https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/siber-extortion-scams-increasing-during-the-covid-19-crisis>. Diakses pada 30 Desember 2021.

Federal Trade Commission Consumer Information, 2019. *How to Recognize and Avoid Phishing Scams*. (Mei 2019). <https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams>. Diakses pada 23 Januari 2022 Pukul 21.23 WIB.

Hukum Online, 2014, *MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, (16 Januari 2014), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan-lt52d80ab053501>. Diakses pada 29 Juni 2022, Pukul 08.40 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2022, ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO (29 Maret 2022), <https://icjr.or.id/icjr-serukan-cabut-pasal-27-ayat-1-uu-ite-atur-pidana-kbgo-dalam-ruu-tpks-dan-pastikan-perlindungan-korban-kbgo/>. Diakses pada 15 Juli 2022. Pukul 05.50 WIB.

Josua Sitompul, 2018. *Risiko Pidana Merekam Aktivitas Seksual dengan Handphone*. (17 September 2018). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-pidana-merekam-aktivitas-seksual-dengan-handphone-lt50935bf2b3e61>. Diakses pada 26 Mei 2022, Pukul 16.56 WIB.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021. *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komnas Perempuan.

-----, 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kusuma, E.& Arum, N. S, 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Jakarta: SAFEnet. (Januari 2019) <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGS-v2.pdf>. Diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 14.40 WIB.

Maidina Rahmawati Nabillah Saputri, 2022. *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Jakarta: SAFEnet.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2020. *Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Siber Selama Pandemi*. (16 Desember 2020). <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-siber-selama-pandemi/>. Diakses pada 19 Februari 2022 Pukul 11.49 WIB.

-----, 2020. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*. Denpasar: SAFEnet.

-----, 2021. [Rilis Pers] *“Lawan KBGS Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan”*. (10 Maret 2021). <https://id.safenet.or.id/2021/03/lawan-kbgs-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>. Diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 09.39 WIB.

-----, 2021, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia: Pandemi Memang Trkendali Tapi Represi Digital Terus Berlanjut, Jakarta: SAFEnet, hlm, 60. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Hak-Digital-2021-Part-KBGO.pdf>. Diakses pada 11 Agustus 2022. Pukul 12.00 WIB.

Siaran Pers, 2022, *Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS* (18 April 2022), <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>. Diakses pada 15 Juli 2022. Pukul 02.22 WIB.

Sri Wiyanti Eddyono dan Fatkhurozi, 2021. *Kertas Kebijakan Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: YLBH APIK.

Suzie Dunn, 2020. *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Canada: Centre for International Governance Innovation (CIGI). Diakses dari https://www.cigionline.org/static/documents/documents/SaferInternet_Paper%20no%201_0.pdf pada 3 Juli 2022, Pukul 09.20 WIB.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2020. *“Siber and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19”*, (8 Mei 2020), <https://www.unwomen.org/>

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/briefsi
ber-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-
en.pdf?la=en&vs=2519. Diakses pada 21 Februari 2022, Pukul 15.02
WIB.

*We Are Social dan Hootsuite, 2021. Digital 2021 Indonesia UK: We Are Social
dan Hootsuite.* (11 Februari 2021). [https://datareportal.com/reports/digital-
2021-indonesia?rq=indonesia%202021](https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia%202021). Diakses pada 30 Desember 2021
Pukul 11.30 WIB.

Wittes, B., Poplin, C., Jurecic, Q., & Spera, C, 2016, *Sextortion: Cybersecurity,
Teenagers, and Remote Sexual Assault, Center for Technology at
Brookings.*

Wolak, J., & Finkelhor, D, 2016. *Sextortion: Findings From A Survey of 1.631
Victims.* University of News Hampshire: Crimes Against Children
Research Center. [https://www.thorn.org/wp-
content/uploads/2016/08/Sextortion_Report.pdf](https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2016/08/Sextortion_Report.pdf). Diakses pada 25 Januari
2022 Pukul 12.18 WIB.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Smn.

